

GERAKAN PEREMPUAN DILIHAT DARI VISI PENDIDIKAN

Oleh: Arief Rohman¹

Pendahuluan

Isu mengenai persamaan gender (*gender equality*) yang dibawa dan digencarkan oleh kaum feminist, dalam dua dasa warsa terakhir ini semakin memperoleh simpati kuat dari banyak kalangan di Indonesia. Walaupun persamaan gender ini sudah diperkenalkan sejak jaman R.A. Kartini (1879-1904), bahkan pada konteks dunia sejak tahun 1970-an PBB telah meletakkan kaum perempuan sebagai agenda global (Mansour Fakih, 1996: 185); namun perbincangan seputar perbedaan gender (*gender differences*) dan ketidakadilan gender (*gender inequalities*) di Indonesia sekarang ini terjadi semakin massif dan intensif.

Seiring dengan isu tersebut, muncul berbagai ragam gerakan perempuan (*feminisme*) dengan dilatarbelakangi aliran pemikiran masing-masing seperti: *Liberal Feminisme*, *Radical feminisme*, *Marxian Feminisme*, *Feminisme sosial*, dan lain-lain (Mansour Fakih, 1996: 52-62), namun sesungguhnya diantara mereka terdapat kesamaan paham, bahwa hakekat perjuangan perempuan adalah demi kesamaan, *dignity*, dan kebebasan untuk mengontrol kehidupan dengan tidak memandang perbedaan jenis kelamin (*sex*).

Ketimpangan gender yang dirasa tidak adil dan indignity ini terlihat pada struktur sosio-ekonomi dan sosio-kultural masyarakat yang bercorak patriarkhis, yakni struktur yang menilai dan menempatkan

*Arief Rohman adalah staf pengajar pada Jurusan Filsafat dan Sosiologi
Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan IKIP YOGYAKARTA*

perempuan sebagai subordinasi dari lelaki. Sedang lelaki itu sendiri dipandang dan ditempatkan sebagai superordinat yang berfungsi sebagai simbol kekuasaan dominan dalam masyarakat. Akibatnya dari sisi budaya, perempuan diorientasikan ke bidang domestik yang mengurus sebatas keluarga dan segala kegiatan yang berkaitan dengan rumah tangga; sedang lelaki diarahkan ke bidang ekonomi dan politik (sebagai kegiatan publik) yang dianggap sebagai institusi utama dalam masyarakat modern.

Akar sosial budaya yang menempatkan perempuan ke arah kegiatan domestik dan lelaki pada kegiatan publik ini, pada gilirannya berimplikasi pada kehidupan ekonomi. Menurut Irwan Abdullah (1995: 5) bidang-bidang pekerjaan ekonomi yang penting dan berupah tinggi cenderung dikerjakan oleh lelaki. Meskipun perempuan mampu menerobos masuk ke bidang ini dan mengerjakan jenis pekerjaan yang sama seperti yang dilakukan lelaki, namun ia mendapatkan upah yang lebih rendah. Termasuk juga mengenai tunjangan keluarga bagi pekerja perempuan, cenderung tidak diperhitungkan seperti halnya pekerja lelaki. Karena itu, kondisi demikian berekses pada munculnya letupan-letupan yang bermuara pada meningkatnya perilaku anarkhis kaum perempuan yang mengakumulasi menjadi beban psikologis, seperti tindakan-tindakan kriminal (mencuri, mencopet, membunuh anak kandung sendiri, dan lain-lain) serta tindakan-tindakan amoral (melacur dan menggugurkan kandungan).

Pada bagian lain, pendidikan sebagai suatu disiplin ilmu yang objek formalnya adalah "upaya normatif pengembangan subjek atau satuan sosial menjadi secara normatif lebih baik (Noeng Muhadjir, 1994: 2), tentu disiplin ini memiliki kerangka atau parameter normatif tertentu mengenai "apa" dan "bagaimana" proses pengembangan tersebut diarahkan agar secara normatif baik atau lebih baik. Kaitannya pendidikan sebagai suatu ilmu, maka pada dataran riil, pendidikan berupaya untuk melakukan agregasi terhadap berbagai hal agar secara

normatif lebih baik. Sekarang persoalannya, ketika ketimpangan gender muncul dalam kenyataan di mana kaum perempuan telah terdesak pada posisi yang tidak menguntungkan, baik pada bidang pendidikan (Kompas, 2 Mei 1996), bidang ekonomi (Irwan Abdullah, 1995: 4), bidang pertanian (Handewi P. Saliem, 1995: 20), termasuk bidang politik dan kebudayaan, maka pertanyaan yang muncul adalah: bagaimana visi pendidikan dalam memandang dan menganalisis mengenai ketimpangan gender ini? Seberapa jauh masalah ketimpangan gender ini bisa dipecahkan menurut kacamata pendidikan? Termasuk dalam tulisan ini yang perlu dikedepankan adalah, bagaimana potret ketimpangan gender itu sendiri terjadi dan gerakan-gerakan perempuan (feminisme) yang memperjuangkannya? Barangkali tulisan ini akan lebih banyak berbicara mengenai hal-hal tersebut.

Feminisme dan Dimensi-dimensinya

Dalam konteks historisnya, feminisme memiliki dimensi-dimensi tertentu yang selanjutnya dari dimensi tersebut kita dapat mengetahui substansi dan modus gerakannya. Paling tidak ada tiga dimensi yang terkait dengan konteks historis tersebut, yakni dimensi sosial, psikologi, dan agama.

Dimensi Sosial. Dimensi sosial menurut Tommy F. Awuy (1996), merupakan dimensi yang paling mencuat dalam sejarah feminisme. Dimensi ini mencakup pendidikan, politik, dan ekonomi, termasuk budaya. Sebenarnya, teori sosial modern tidak pernah lepas dari kemunculan feminisme. Hanya pada masa-masa tertentu ia menjadi sangat maskulin terutama ketika muncul aliran Darwinisme sosial. Oleh aliran ini perempuan dinilai sebagai golongan yang lemah. Dalam logika "seleksi alamiah" dari Darwin, ia dinyatakan kalah dan karena itu tak layak diperhitungkan dalam teori sosial.

Para feminisme telah menyadari bahwa ketiga unsur sosial itu, telah dikonstruksi sedemikian rupa oleh sistem patriarkhi sehingga

terjadi apa yang disebut ketimpangan gender (*gender inequality*). Perempuan misalnya telah didiskriminasi dalam pendidikan hingga membuat mereka minim pengetahuan. Data dari UNICEF tahun 1995 menyebutkan, dari sekitar 100 juta anak di dunia yang berumur 6 - 11 tahun tidak memperoleh pendidikan dasar, dan 70 persen diantaranya adalah perempuan. Sementara kapitalisme hanya mengeksploitasi tenaga tanpa ditunjang dengan gaji yang memadai dan terutama mentabukannya duduk dalam status sebagai pemilik modal. Dalam politik, jangankan menjadi pemimpin, memiliki hak pilih pun perempuan tidak diperkenankan. Tak mengherankan jika di Amerika Serikat, amandemen hak pilih (*suffrage*) untuk kaum perempuan baru diberlakukan pada tahun 1920 atas perjuangan dari feminis seperti Abigail Smith Adams, Elisabeth Cady Stanton, Susan B. Anthony, dan lain-lain.

Dalam sosialisasi budaya, melalui keluarga, sekolah, bacaan, dan televisi, perempuan diajarkan tentang bagaimana menjadi "wanita ideal" yang sebenarnya ukurannya adalah didesain oleh lelaki (Irwan Abdullah, 1995: 7). Proses ini berlangsung secara terus-menerus sehingga seakan-akan memiliki "daya paksa" terhadap perempuan (Peter Berger dan T. Luckmann, 1979).

Dimensi Psikologi. Perekayasaan sosial-ekonomi patriarkhi ternyata telah membawa pengaruh pada individualitas perempuan hingga ke unsur psikhis bawah sadarnya (*unconsciousness*). Intinya, rekayasa dianggap sebagai sebuah kodrat (Tommy F. Awuy, 1996). Lebih lanjut Tommy menjelaskan bahwa secara psikologis perempuan menerima begitu saja bahwa ia adalah makhluk yang lemah. Tetapi pada akhirnya berubah dan berkembang, ketika muncul konsep "*Super women*" misalnya yang diangkat oleh Betty Friedan pada tahun 1970-an, simbol patriarkhi mengalami serangan hebat. Dunia bawah sadar perempuan diangkat atau tersublimasi khususnya dari *domestic sphere* ke *public sphere*. Perekayasaan sosial kemudian menjelma menjadi lebih matang, yakni "perekayasaan genetika" oleh perempuan sendiri

terjadi apa yang disebut ketimpangan gender (*gender inequality*). Perempuan misalnya telah didiskriminasi dalam pendidikan hingga membuat mereka minim pengetahuan. Data dari UNICEF tahun 1995 menyebutkan, dari sekitar 100 juta anak di dunia yang berumur 6 - 11 tahun tidak memperoleh pendidikan dasar, dan 70 persen diantaranya adalah perempuan. Sementara kapitalisme hanya mengeksploitasi tenaga tanpa ditunjang dengan gaji yang memadai dan terutama mentabukannya duduk dalam status sebagai pemilik modal. Dalam politik, jangankan menjadi pemimpin, memiliki hak pilih pun perempuan tidak diperkenankan. Tak mengherankan jika di Amerika Serikat, amandemen hak pilih (*suffrage*) untuk kaum perempuan baru diberlakukan pada tahun 1920 atas perjuangan dari feminis seperti Abigail Smith Adams, Elisabeth Cady Stanton, Susan B. Anthony, dan lain-lain.

Dalam sosialisasi budaya, melalui keluarga, sekolah, bacaan, dan televisi, perempuan diajarkan tentang bagaimana menjadi "wanita ideal" yang sebenarnya ukurannya adalah didesain oleh lelaki (Irwan Abdullah, 1995: 7). Proses ini berlangsung secara terus-menerus sehingga seakan-akan memiliki "daya paksa" terhadap perempuan (Peter Berger dan T. Luckmann, 1979).

Dimensi Psikologi. Perekayasa sosial-ekonomi patriarkhi ternyata telah membawa pengaruh pada individualitas perempuan hingga ke unsur psikis bawah sadarnya (*unconsciousness*). Intinya, rekayasa dianggap sebagai sebuah kodrat (Tommy F. Awuy, 1996). Lebih lanjut Tommy menjelaskan bahwa secara psikologis perempuan menerima begitu saja bahwa ia adalah makhluk yang lemah. Tetapi pada akhirnya berubah dan berkembang, ketika muncul konsep "*Super women*" misalnya yang diangkat oleh Betty Friedan pada tahun 1970-an, simbol patriarkhi mengalami serangan hebat. Dunia bawah sadar perempuan diangkat atau tersublimasi khususnya dari *domestic sphere* ke *public sphere*. Perekayasa sosial kemudian menjelma menjadi lebih matang, yakni "perekayasa genetika" oleh perempuan sendiri

setelah dalam ruang publik mereka mendapatkan kemandirian ekonomi.

Dimensi Agama. Sejarah perempuan Arab pasca Muhammad dan Khulafaur Rashidin digambarkan oleh Fatima Mernissi (1994) merupakan sejarah akan belenggu-belenggu hijab dan tembok-tembok harem dialami oleh perempuan di sana.

Fenomena demikian tidak hanya terjadi di Arab, bahkan di Eropa lebih targis lagi, yang kemudian munsul liberalisme klasik John Locke. Pada sisi tertentu liberalisme Locke sebenarnya telah memberikan benih bagi feminisme dalam dimensi agama. Menurut Locke, Tuhan yang adil pasti menciptakan sesuatu yang adil pula. Ia menolak argumentasi Robert Filmer yang mengatakan bahwa perempuan menurut agama Kristen diciptakan dari tulang rusuk lelaki. Oleh karenanya, lelaki kata Filmer, harus dinomorsatukan atau pemimpin dan perempuan hanya suplemen.

Sebenarnya ketimpangan gender secara luas dalam agama bersumber dari interpretasi terhadap agama, bukan bersumber dari watak agama itu sendiri. Karena itu menurut Mananzan (1992) tidak benar agama dijadikan kambing hitam terhadap terjadinya ketimpangan gender dan pelanggaran ketidakadilan gender.

Dalam konteks Islam, muncul pertanyaan: bisakah seorang perempuan menjadi kepala negara, pemimpin lembaga atau kepala rumah tangga? Menurut Mansour Fakih (1996: 173), melalui telaah Qur'an tidak ada alasan yang tegas untuk melarang perempuan memiliki posisi seperti itu, kecuali sebuah *hadist ahad* riwayat Abu Bakar yang menjadi dasar pendukung pandangan ini. Dalam hadist tersebut menurutnya sangat bertentangan dengan peristiwa perang unta di mana Aisyah istri Nabi adalah yang memimpin komando perang.

Akar Sosial Budaya Gender dan Gerakan Perempuan

Ketimpangan gender yang lebih mengarah kepada ketidakadilan gender (*gender inequity*) terutama pada bidang ekonomi, sosial, dan politik sebenarnya berakar dari sosial budaya masyarakat. Misalnya

kecenderungan lelaki yang diorientasikan ke bidang publik dan perempuan ke bidang domestik, sebenarnya bersumber dari nilai-nilai budaya yang memang patriarkhis. Dalam proses sosialisasi perempuan cenderung dihubungkan dengan kegiatan domestik tersebut, yang dianggap sebagai kegiatan "kurang" penting dalam perkembangan masyarakat modern yang bertumpu pada proses produksi dan birokrasi. Sementara lelaki lebih diarahkan pada bidang-bidang penting yaitu produksi dan birokrasi ini. Hal ini pada gilirannya memunculkan apa yang disebut ketimpangan gender yang terus menerus, karena perempuan dalam proses sosialisasi diasosiasikan ke dalam suatu nilai dan ukuran sosial budaya yang kemudian pilihan-pilihannya ditentukan oleh lelaki (*patriarkhi*).

Menurut Irwan Abdullah (1995: 6), kedudukan perempuan karena dibingkai oleh tatanan yang terpusat pada lelaki yang ditegaskan oleh lembaga-lembaga pendukung. Mitos-mitos telah dibangun untuk menyatakan bahwa tempat lelaki adalah di dunia kerja dalam perjuangannya untuk hidup, sementara tempat perempuan adalah di rumah, mengatur rumah tangga dan merawat anak (Janet Solomon, 1988: 195). Proses sosialisasi semacam ini telah membatasi pilihan-pilihan hidup perempuan, sebagaimana yang digambarkan oleh Enggawati Tedjasukmana (1990) bahwa prestasi tertinggi bagi perempuan adalah bila pandai di dapur, berhasil menikah dan mempunyai anak, bukan pada kegiatan-kegiatan di luar dapur, anak, rumah tangga yang sebenarnya tidak cocok bagi perempuan.

Lebih lanjut menurut Irwan Abdullah (1995: 7), pengaruh akar sosial budaya dalam mengasosiasikan perempuan sebagai kelompok orang yang memiliki ciri tertentu, telah memberi warna dalam keterlibatan ekonomi, sosial, dan politik perempuan. Pemaknaan keterlibatan ekonomi, sosial, dan politik perempuan ditentukan oleh sistem ideologi yang memberi kemungkinan dan batasan. Ideologi ini terwujud dalam etos kerja yang mempengaruhi keterlibatan perempuan karena ia kemudian membentuk etika kehidupan yang bersifat evaluatif. Ukuran-ukuran nilai dan keterlibatan perempuan ditentukan oleh etika-etika tersebut. Proses sosialisasi yang cenderung mengasosiasikan perempuan

dengan kegiatan domestik dan sifat keperempuanan/kewanitaan, menyebabkan terjadinya proses identifikasi pekerjaan-pekerjaan atau jabatan-jabatan publik yang sesuai dengan sifat perempuan. Hal ini dapat dilihat, kecenderungan bahwa perempuan ternyata terlibat dalam sektor-sektor yang sudah terpola dan terpusat pada pekerjaan-pekerjaan atau jabatan-jabatan yang bersifat "menerima perintah". Dalam kegiatan ekonomi misalnya, perempuan hanya terpusat pada pekerjaan-pekerjaan sekretaris, resepsionis, *waitress* atau pembantu rumah tangga. Sementara lelaki mengidentifikasikan dan mempolakan dirinya sebagai "pemberi perintah".

Dari akar sosial budaya munculnya perbedaan gender tersebut anehnya gerakan perempuan yang sekarang ini marak justru lebih pada gerakan yang perjuangannya mengarah pada transformasi dengan pendekatan struktural, yakni berupaya bagaimana mengubah struktur tatanan masyarakat yang lebih egaliter. Padahal akar persoalannya lebih pada nilai-nilai kultural yang telah diyakini masyarakat.

Secara umum gerakan-gerakan perempuan yang ada dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok yang menganut dua paradigma dalam teori ilmu sosial. Yaitu gerakan yang tergabung dalam kelompok paradigma strukturalisme fungsional dan paradigma konflik.

Paradigma strukturalisme fungsional yang dikembangkan Robert K. Merton dan T. Parsons ini berpandangan bahwa masyarakat adalah suatu sistem yang terdiri dari bagian-bagian yang saling terkait dan masing-masing bagian tersebut secara terus menerus menjaga keseimbangan (*equilibrium*) dan harmoni. Bagi teori ini status quo harus dipertahankan dan menghindari konflik atau ketidakseimbangan, termasuk dalam hubungannya kaum lelaki dan perempuan dalam masyarakat. Gerakan perempuan yang tergolong ke dalam paradigma ini adalah gerakan yang beraliran *feminisme liberal*. Feminisme liberal ini berpandangan bahwa kebebasan dan persamaan berakar pada rasionalitas serta pemisahan antara dunia privat dan umum (Mansour Fakih, 1996: 85). Kerangka feminisme liberal dalam memperjuangkan persoalan masyarakat tertuju pada "kesempatan yang sama dan hak yang sama, bagi setiap individu baik lelaki maupun perempuan. Oleh karena

itu, dalam rangka menuju tatanan masyarakat yang demikian, melibatkan kaum perempuan dalam industrialisasi dan program-program pembangunan lain oleh aliran ini dianggap sebagai jalan untuk meningkatkan status perempuan. Misalnya program "*women in development*".

Paradigma yang kedua adalah konflik. Dalam paradigma ini diyakini bahwa setiap kelompok masyarakat memiliki kepentingan dan keinginan untuk berkuasa. Kepentingan dan kekuasaan adalah pusat dari setiap hubungan sosial termasuk antara lelaki dan perempuan. Dalam kelompok paradigma ini gerakan perempuan yang ada adalah yang beraliran feminisme radikal dan feminisme marxist.

Feminisme radikal berbeda dengan feminisme liberal. Gerakan ini beraliran feminisme radikal (Mansour Fakih, 1996: 89), beranggapan bahwa penyebab ketidakadilan hubungan lelaki dan perempuan adalah bersumber dari unsur-unsur seksual atau biologis lelaki beserta ideologi patriarkhi mereka. Lelaki yang secara biologis misalnya dalam hubungan seks memiliki posisi dominan dari perempuan, oleh karenanya penguasaan fisik perempuan oleh lelaki seperti hubungan seks tersebut adalah merupakan bentuk dasar penindasan terhadap kaum perempuan. Hal ini diperparah lagi dengan ideologi patriarkhi, dimana patriarkhi ini oleh kaum radikal dikatakan sebagai ideologi penindasan yang menempatkan lelaki memiliki kekuasaan superior dan privileg dalam berbagai bidang dibanding perempuan. Oleh karenanya persoalan sentralnya bagi kaum radikal adalah lelaki itu sendiri.

Feminisme marxist dalam memandang mengenai penindasan bukan bersumber dari unsur-unsur biologis lelaki yang sempit, tetapi lebih pada sistem eksploitasi ekonomi dan politik yang bersifat struktural. Jadi yang diperjuangkan adalah bukan bagaimana melawan lelaki beserta ideologi patriarkhinya, akan tetapi bagaimana bisa melakukan transformasi yang dapat membongkar suatu struktur ekonomi dan sosial yang menindas tersebut. Sebenarnya bentuk-bentuk penindasan yang ada tidak hanya dialami oleh perempuan, tetapi lelaki pun juga bisa ditindas oleh suatu struktur ekonomi dan sosial yang eksploitatif.

Visi Pendidikan

Gerakan perempuan (feminisme) yang marak belakangan ini, kalau dilihat dari segi substansi perjuangannya dapat dikatakan memperoleh relevansi kuat, mengingat perbedaan gender (*gender differences*) dan ketidakadilan gender (*gender inequities*) telah dirasakan oleh kaum perempuan di berbagai bidang kehidupan. Dari pandangan pendidikan, substansi perjuangan demikian secara normatif dinilai tepat atau baik. Yakni perjuangan untuk memperoleh kesamaan, dignity, dan kebebasan untuk mengontrol kehidupan dengan tidak memandang perbedaan jenis kelamin.

Secara normatif, pendidikan selalu berupaya meningkatkan derajat, harkat, dan martabat manusia serta kualitas kehidupannya. Upaya normatif ini tentu bisa diartikan juga bahwa pendidikan mendorong terciptanya kesamaan, dignity, dan kebebasan untuk mengontrol kehidupan dengan tidak memandang perbedaan antar jenis kelamin. Versi lain dari pernyataan ini sebagaimana dinyatakan Driyarkara (1978: 101) bahwa manusia sebagai "persona" itu tidak pernah sempurna, justru karena aspek inilah fungsi pendidikan menjadi menonjol. Manusia sebagai "persona" tidak pernah sempurna, akan tetapi ia "dapat dan harus menjadi sempurna". Dengan kata lain, ia harus mewujudkan diri dan kehidupannya ke arah yang lebih baik atau sempurna.

Karena orientasi perjuangan yang secara normatif baik, maka cara-cara yang ditempuh juga harus baik. Dalam paradigma normatif ilmu pendidikan mensyaratkan bahwa disamping tujuan yang secara normatif baik, juga proses yang dilakukan secara normatif harus baik pula. Sehingga dengan demikian diharapkan hasil dan dampak yang terwujud secara normatif akan baik (Noeng Muhadjir, 1994: 3).

Akan tetapi pada bagian lain, dalam modus gerakan perempuan (feminisme) lebih condong ke pendekatan struktural dalam mencapai tujuan perjuangan. Padahal akar persoalan dari ketimpangan dan ketidakadilan gender lebih bersumber dari akar sosial budaya masyarakat. Yakni nilai-nilai sosial dan budaya yang diyakini masyarakat secara turun temurun dari generasi ke generasi dalam jangka waktu yang lama itu, memang menguntungkan lelaki. Dengan kata lain, nilai-nilai sosial

dan budaya masyarakat tersebut bersifat patriarkhis. Oleh karena itu upaya normatif yang paling tepat adalah dengan pendekatan kultural.

Misalnya model yang dilakukan oleh gerakan yang beraliran feminisme liberal dengan melibatkan kaum perempuan dalam industrialisasi dan program-program pembangunan (Mansour Fakih, 1996: 87), sebenarnya dari sisi kesamaan kesempatan antara lelaki dan perempuan memang tepat. Tetapi dari sisi lain, cara-cara demikian bisa berekses pada penurunan derajat perempuan. Termasuk dalam kaitannya dengan pendekatan struktural ini, menurut Mansour Fakih (1996: 186) bahwa saat ini hampir semua gerakan perempuan memfokuskan pada aksi, dan aksi yang paling besar adalah mempengaruhi feminisme sebagai gerakan dalam hal ini menjadi penentu kebijakan politik dan ekonomi. Oleh karena itu, hal yang paling tepat dilakukan oleh gerakan perempuan sebenarnya adalah melakukan gerakan kultural dengan cara mengkampanyekan dan mensosialisasikan secara terus menerus dalam jangka waktu yang relatif panjang mengenai ide-ide yang bermuatan nilai kesamaan, dignity, dan kebebasan untuk mengontrol kehidupan dengan tidak memandang perbedaan jenis kelamin.

Kesimpulan

Ketimpangan dan ketidakadilan gender dalam masyarakat telah mendorong pada maraknya gerakan perempuan (feminisme) dalam dua dekade terakhir ini khususnya di Indonesia. Upaya pembelaan terhadap kaum perempuan oleh sejumlah LSM selalu mewarnai sejumlah surat kabar di Indonesia. Sehingga kehadiran mereka dalam konteks perjuangan gender lebih berdampak positif. Dalam konteks dunia, isu mengenai gender ini juga menghangat terbukti banyak seminar dan konperensi internasional diadakan, seperti tahun 1993 lembaga yang bernama *Society for International Development (SID)* yang berkantor di Roma menyelenggarakan seminar mengenai ini dengan mengundang LSM gerakan perempuan seluruh dunia.

Banyaknya gerak perempuan yang ada mengindikasikan bahwa perjuangan gender memang sesuatu yang dianggap penting khususnya di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Dari keseluruhan yang

ada, gerakan perempuan ini terbagi ke dalam dua kelompok besar yang menganut dua paradigma sebagaimana dalam khasanah ilmu sosial, yakni gerakan perempuan yang masuk kepada kelompok paradigma strukturalisme fungsional (aliran Feminisme Liberal) dan paradigma konflik (aliran Feminisme Radikal dan Feminisme Marxist). Tetapi dari kesemuanya gerakan yang beragam serta aliran yang berbeda pula, terdapat kesamaan paham bahwa hakekat perjuangan mereka adalah demi kesamaan, dignity, dan kebebasan untuk mengontrol kehidupan dengan tidak memandang perbedaan jenis kelamin.

Substansi perjuangan yang bertujuan untuk memperoleh kesamaan, dignity, dan kebebasan untuk mengontrol kehidupan dengan tidak memandang perbedaan jenis kelamin tersebut, dari pandangan pendidikan memperoleh relevansi yang tepat. Tetapi dari modus perjuangan gerakan perempuan yang lebih menekankan pada gerakan struktural, secara normatif kurang relevan mengingat akar persoalan ketimpangan dan ketidakadilan gender adalah bersumber dari akar nilai soail budaya. Karena itu yang paling relevan sebenarnya adalah dengan menggunakan pendekatan kultural. Yakni dengan cara mengkampanyekan dan mensosialisasikan secara terus menerus dalam jangka waktu yang relatif panjang mengenai ide-ide yang bermuatan nilai kesamaan, dignity, dan kebebasan untuk mengontrol kehidupan dengan tidak memandang perbedaan jenis kelamin.

Daftar Pustaka

Berger, Peter and T. Luckmann. 1979. *The Social Construction of Reality: A Treatise in The Sociology of Knowledge*. New York: Penguin Books

Driyarkara. 1978. *Percikan Filsafat*. Jakarta: PT. Pembangunan

- Enggawati Tedjasukmana. 1990. "Sekali Lagi Wanita Karier". *Jawa Pos*, 12 Desember 1990
- Patima Mernissi. 1994. *Islam dan Demokrasi: Antologi Ketakutan*. Yogyakarta: LKIS
- Handewi P. Saliem. 1995. "Potensi Wanita dalam Perekonomian Pedesaan". *Prisma No. 6-1995*. Jakarta
- Irwan Abdullah. 1995. "Reproduksi Ketimpangan Gender: Partisipasi Wanita dalam Kegiatan Ekonomi". *Prisma No. 6-1995* Jakarta:
- Mananzan, St. M. John. 1992. *Wöwen and Religion*. Manila: Institute of Women's Studies St. Scholastic's College
- Mansour Fakih. 1996. *Menggeser Konsep Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Noeng Muhadjir. 1994. "Ilmu Pendidikan sebagai Ilmu". *Majalah Dinamika Pendidikan No.1/Th.1/1994*. FIP IKIP Yogyakarta
- Solomon, Janet. 1988. *The Sign of Our Time: The Hidden Messages of Environments, Objects, and Cultural Image*. Los Angeles: Jeremy P. Tarcher, Inc
- Tommy F. Awuy. 1996. "Feminisme Multidimensional". *Kompas*, 20 April 1996